



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
NOMOR 35 TAHUN 2023**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS INVESTIGASI HASIL PENGENDALIAN HAMA DAN
PENYAKIT IKAN KARANTINA/HAMA DAN PENYAKIT IKAN TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN,**

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaan pencapaian indikator kinerja utama dokumen mitigasi Risiko lalu lintas media pembawa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan tentang Petunjuk Teknis Investigasi Hasil Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan Tertentu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);

3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS INVESTIGASI HASIL PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN KARANTINA/HAMA DAN PENYAKIT IKAN TERTENTU.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Investigasi Hasil Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2023

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN,

ttd.

PAMUJI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu, dan
Keamanan Hasil Perikanan,



Hari Maryadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA
IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS INVESTIGASI HASIL
PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN
KARANTINA/HAMA DAN PENYAKIT IKAN
TERTEHTU

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu amanah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang terkait dengan penyelenggaraan Karantina Ikan adalah mencegah masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan Tertentu (HPIK/HPI Tertentu) dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, penyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan menjadi tugas Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM). Sementara tugas-tugas yang terkait dengan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan perkarantinaan dan keamanan hayati ikan diemban oleh Pusat Karantina Ikan (Puskari). Adapun pelaksanaan teknis penyelenggaraan karantina ikan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPT KIPM) berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

BKIPM melalui pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK/HPI Tertentu, berperan dalam menjaga kelangsungan budidaya dan kelestarian sumber daya alam serta peningkatan produksi perikanan Indonesia. Serangan penyakit menjadi salah satu faktor yang menghambat keberhasilan budidaya ikan, sehingga perlu langkah-langkah pengendalian terhadap serangan penyakit ikan tersebut. Terkait kejadian serangan penyakit terutama yang termasuk dalam daftar HPIK/HPI tertentu, BKIPM melalui Pusat dan UPT KIPM memiliki tanggung jawab penelusurannya atau investigasi untuk melakukan konfirmasi keterkaitan kejadian penyakit tersebut dengan kegiatan lalu lintas media pembawa HPIK, disamping untuk menentukan langkah-langkah pencegahan penularan atau penyebaran penyakit yang lebih luas. Investigasi dilaksanakan oleh Puskari dan UPT KIPM berdasarkan informasi serangan penyakit ikan dari laporan masyarakat dan instansi terkait di wilayah kerjanya, maupun temuan positif pada kegiatan pemantauan HPIK dan surveilan instalasi karantina ikan (IKI) yang secara rutin dilaksanakan oleh UPT KIPM. Melalui investigasi dapat diperoleh

data penyebab penyakit dan luasan sebaran kejadian penyakit, yang selanjutnya dapat menjadi bahan rumusan rekomendasi untuk mengurangi risiko atau mencegah terjadinya kembali kasus serupa. Selanjutnya untuk memberikan acuan bagi Pusat dan UPT KIPM dalam pelaksanaan kegiatan investigasi, dengan pemahaman dan persepsi yang sama, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Investigasi Hasil Pengendalian HPIK/HPI Tertentu, sehingga diperoleh data dan informasi yang valid, akurat dan akuntabel.

B. Tujuan

Tujuan Petunjuk Teknis (Juknis) ini adalah sebagai acuan bagi Tim Pusat maupun UPT KIPM dalam melakukan Investigasi hasil pengendalian HPIK/HPI Tertentu.

C. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dengan adanya Juknis ini adalah terlaksananya kegiatan Investigasi hasil pengendalian HPIK/HPI Tertentu yang dilakukan oleh UPT KIPM, dalam rangka pengendalian HPIK/HPI Tertentu di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran, yaitu:

1. terlaksananya Investigasi oleh Pusat terhadap hasil pelaksanaan pengendalian HPIK/HPI Tertentu atau hasil Investigasi oleh UPT KIPM;
2. terlaksananya Investigasi oleh UPT KIPM yaitu dalam rangka penelusuran yang meliputi:
 - a. adanya hasil positif HPIK yang terkait dengan kegiatan lalu lintas Media Pembawa termasuk surveilan HPIK/HPIT;
 - b. adanya hasil positif HPIK pada kegiatan pemantauan HPIK;
 - c. adanya laporan masyarakat perikanan/pengguna jasa/*stakeholder* terkait adanya kejadian atau kasus penyakit; dan
 - d. adanya dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan Tindakan Karantina terhadap importasi Media Pembawa, selama masa karantina di IKI.
3. tersusunnya rekomendasi tindakan perbaikan sesuai permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing UPT KIPM sebagai upaya mengurangi Risiko pemasukan dan penyebaran HPIK/HPI Tertentu.

D. Manfaat

Manfaat dari Juknis Investigasi Hasil Pengendalian HPIK/HPI Tertentu ini yaitu:

1. Tim Pelaksana memiliki persamaan persepsi dalam memahami seluruh proses pelaksanaan kegiatan Investigasi;
2. Pelaksanaan kegiatan Investigasi oleh Pusat atau UPT KIPM dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan; dan
3. Tim Pelaksana lebih mudah dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa atau mengevaluasi data sehingga dapat dirumuskan rekomendasi yang tepat.

E. Definisi

1. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
2. Evaluasi adalah kegiatan memantau perubahan yang fokus pada proses dan hasil kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan yang dilakukan secara sistematis dengan menginvestigasi efektifitas program.

3. Investigasi adalah proses penyelidikan dengan melakukan pengumpulan data, informasi dan hal lain yang diperlukan melalui penelusuran untuk menemukan kebenaran atau kesalahan fakta dan/atau memastikan penyebab terjadinya wabah penyakit ikan dalam rangka tindakan perbaikan.
4. Verifikasi adalah pemeriksaan kebenaran terhadap laporan atau pernyataan yang telah dilakukan oleh UPT KIPM.
5. Risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang.
6. Tindakan Karantina Ikan yang selanjutnya disebut Tindakan Karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, satwa liar, dan satwa langka dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya hama dan penyakit ikan dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.
7. Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disebut HPIK adalah semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di area tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosioekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuk ke dalam, tersebar di dalam, dan/atau keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Hama dan Penyakit Ikan Tertentu yang selanjutnya disebut HPI Tertentu adalah semua HPI selain HPIK yang belum dan/atau tidak ditetapkan sebagai HPIK tetapi dicegah pemasukannya ke dalam dan/atau antar area di dalam wilayah negara Republik Indonesia atau dipersyaratkan oleh negara tujuan.
9. Media Pembawa adalah ikan, produk ikan, pangan, pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif dan/atau Media Pembawa lain yang dapat membawa HPIK.
10. Surveilans HPIK/HPI Tertentu adalah pengumpulan, analisis dan diseminasi informasi secara sistematis yang dilakukan di IKI untuk membuktikan bahwa suatu populasi bebas penyakit tertentu, atau untuk mendeteksi adanya penyakit baru/eksotik dalam rangka pengendalian penyakit secara cepat.
11. Tim Pelaksana Kegiatan Investigasi, yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah beberapa personil yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan Investigasi hasil pengendalian HPIK/HPI Tertentu.

BAB II POLA DASAR, METODOLOGI, DAN STRATEGI PELAKSANAAN

A. Pola Dasar

Pola dasar kegiatan Investigasi dilakukan terhadap hasil Tindakan Karantina yang dilakukan oleh UPT KIPM sebelum pemasukan/pengeluaran, pada saat pemasukan/pengeluaran dan setelah pemasukan/pengeluaran serta adanya laporan dari masyarakat perikanan/pengguna jasa/*stakeholder*. Investigasi dilakukan dalam rangka Evaluasi dan penelusuran untuk mengetahui fakta atau temuan sehingga dapat dirumuskan tindakan perbaikannya. Kegiatan Investigasi dilaksanakan oleh Pusat maupun UPT KIPM.

1. Ruang Lingkup Kegiatan Investigasi

a. Investigasi yang dapat dilakukan oleh Pusat, yaitu:

- 1) Tindak lanjut terhadap hasil Evaluasi berdasarkan data *sisterkaroline* atau laporan Surveilan HPIK/HPI Tertentu yang patut diduga terdapat ketidaksesuaian/penyimpangan;
- 2) Tindak lanjut atas adanya laporan dari UPT KIPM atau pihak lain terkait adanya kasus penyakit, wabah atau kegiatan lalu lintas Media pembawa; dan
- 3) Tindak lanjut terhadap adanya dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan Tindakan Karantina pada importasi Media Pembawa, terutama pada kegiatan pengasingan selama masa karantina (untuk mengetahui kondisi kesehatan Media Pembawa, kepatuhan dan tindakan yang dilakukan oleh importir/pemilik dan/atau UPT KIPM);
- 4) Tindak lanjut dan/atau pendampingan terhadap kegiatan Investigasi yang dilakukan oleh UPT KIPM.

b. Investigasi yang dapat dilakukan oleh UPT KIPM, yaitu:

- 1) Adanya hasil pengujian positif HPIK/HPI Tertentu pada kegiatan lalu lintas Media Pembawa;
- 2) Adanya hasil pengujian positif HPIK/HPI Tertentu pada kegiatan surveilan di IKI;
- 3) Adanya hasil pengujian positif HPIK pada kegiatan pemantauan HPIK;
- 4) Adanya laporan masyarakat perikanan/pengguna jasa/*stakeholder* terkait adanya kejadian atau kasus penyakit atau wabah di suatu lokasi budidaya (yang tidak terkait dengan kegiatan lalu lintas). Pelaksanaan Investigasi di lokasi budidaya ini hanya dapat dilakukan setelah dilakukan koordinasi dengan pihak terkait (Dinas/Pemda setempat);
- 5) Adanya keterlibatan sebagai tim satuan gugus tugas tanggap darurat penyakit ikan di suatu wilayah tertentu, sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; dan
- 6) Tindak lanjut adanya dugaan penyimpangan atau kasus positif HPIK terkait kegiatan importasi media pembawa pada pengasingan selama masa karantina, untuk mengetahui kondisi kesehatan, kepatuhan dan tindakan yang dilakukan oleh importir/pemilik atau pejabat karantina.

2. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh pada kegiatan Investigasi merupakan penelusuran dari suatu hasil Evaluasi, temuan ketidaksesuaian/hasil pemeriksaan atau adanya laporan kasus penyakit. Oleh karena itu, data tidak hanya fokus pada kasus atau ketidaksesuaian yang ditemukan, tetapi dapat berkembang sesuai kebutuhan, seperti: asal

ikan, pemasok, distribusi, dan lain-lain, sehingga dapat diketahui faktor-faktor penyebab, potensi Risiko dan tindakan pengendalian/perbaikan untuk mengurangi potensi Risiko tersebut. Pengumpulan data dalam rangka penelusuran tersebut dilakukan dengan mempergunakan kuesioner sesuai dengan kondisi masing-masing. Apabila dianggap perlu, untuk mendapatkan kepastian atas kondisi-kondisi tersebut Tim pelaksana dapat melakukan pengambilan sampel untuk dilakukan pengujian atau memerintahkan pengujian kepada pihak yang berkepentingan.

3. Evaluasi

Hasil Investigasi berupa data-data hasil penelusuran maupun hasil pengujian kemudian dievaluasi untuk menentukan penyebabnya, ketertelusuran dan jalur distribusinya atau potensi Risiko yang dapat terjadi. Berdasarkan hasil Evaluasi tersebut kemudian digunakan untuk menentukan rekomendasi tindakan perbaikan dalam rangka menghilangkan atau mengurangi Risiko.

4. Penyusunan Rekomendasi

Tim Pusat menyusun rekomendasi berdasarkan hasil Evaluasi, sebagai tindak lanjut hasil Investigasi. Rekomendasi hendaknya mencakup:

- a. permasalahan yang muncul;
 - b. penyebab permasalahan;
 - c. tindakan perbaikan;
 - d. jangka waktu perbaikan; dan
 - e. pihak-pihak yang terkait, untuk melakukan tindakan perbaikan.
- Rekomendasi sebaiknya disampaikan kepada pihak terkait sesuai dengan rumusan rekomendasi. Dalam hal rekomendasi bersifat mendesak dan harus segera dilaksanakan atau melibatkan pihak lain, maka Pusat Karantina Ikan berkoordinasi dengan pihak lain tersebut.

B. Metodologi

Kegiatan Investigasi dilakukan dengan isian formulir pada Petunjuk Teknis ini sesuai temuan masing-masing. Kegiatan Investigasi dimulai dengan melakukan Verifikasi dokumen, laporan dan Verifikasi lapangan ke UPT KIPM, masyarakat perikanan/pengguna jasa/*stakeholder*, *farm* atau lokasi budidaya.

1. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengamatan Langsung (*Observasi*)

Pengamatan Langsung merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengukuran dan pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan. Dengan kata lain observasi adalah merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi) yang digunakan/ditujukan untuk mempelajari perilaku responden serta proses kerjanya. Guna menunjang proses pengamatan, Tim Pelaksana dapat menggunakan peralatan untuk mencatat atau merekam peristiwa penting yang terjadi. Peralatan yang digunakan dapat berupa alat perekam seperti kamera, *sound recorder*, dan lain-lain.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh Tim Pelaksana kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Pada kegiatan ini Tim melakukan tanya jawab dengan petugas UPT KIPM (selaku pelaksana IKU) dan pengguna jasa

karantina ikan (apabila dipandang perlu). Keberhasilan pelaksanaan wawancara ini tergantung pada proses interaksi yang terjadi. Unsur yang menentukan proses interaksi ini adalah wawasan dan pengertian (*insight*) yang dimiliki oleh Tim Pelaksana. Terkait dengan hal ini, diperlukan pemahaman terhadap substansi setiap pertanyaan yang terdapat di dalam kuesioner serta keterampilan yang dapat menciptakan situasi yang kondusif agar dapat menggugah responden untuk mengungkapkan keadaan yang sebenarnya, sebagai data yang diharapkan dalam pengamatan.

c. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada responden. Dokumen dapat berupa hasil Evaluasi rutin dari aplikasi *sisterkaroline*, buku kegiatan operasional harian, buku pelaporan pemeriksaan karantina, agenda pemeriksaan klinis/laboratoris, laporan berkala, dan dokumen lainnya guna melakukan Verifikasi terhadap jawaban kuesioner/laporan yang diisi oleh penanggung jawab kegiatan dan diketahui oleh Kepala UPT KIPM.

d. Korespondensi

Korespondensi dilakukan melalui penyampaian kuesioner/form kepada responden (UPT KIPM) untuk melakukan pengisian berdasarkan data-data hasil Tindakan Karantina, laporan atau hasil Investigasi. Korespondensi dilakukan untuk mempercepat proses kegiatan Investigasi bagi Tim Pelaksana.

2. Pengolahan Data dan Evaluasi

Pengolahan data dan Evaluasi dilakukan dengan menelaah data/informasi serta hasil pengamatan langsung secara kualitatif maupun kuantitatif dengan mengacu pada isian kuesioner. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui permasalahan/kendala yang dihadapi sehingga dapat dirumuskan tindakan perbaikan untuk meningkatkan capaian tingkat pengendalian HPIK/HPI Tertentu oleh UPT KIPM, dan merumuskan rekomendasi perbaikan sesuai permasalahan masing-masing.

3. Penyusunan Laporan

Setelah kegiatan Investigasi dilakukan, maka Tim Pelaksana segera menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sebagai pertanggungjawaban dan untuk kemudian dilakukan Evaluasi serta dirumuskan rekomendasi atau tindak lanjut perbaikannya.

C. Strategi Pelaksanaan

Pelaksanaan Investigasi merupakan salah satu kegiatan untuk mendukung capaian IKU Pusat Karantina Ikan yaitu Dokumen Mitigasi Risiko Lalu Lintas Media Pembawa. Strategi pelaksanaan kegiatan Investigasi untuk dilakukan melalui:

1. Penyediaan Petunjuk Teknis sebagai acuan dalam pelaksanaan Investigasi, sehingga dapat dilaksanakan dengan tepat sesuai tujuan dan sasaran;
2. Sosialisasi Petunjuk Teknis kepada PHPI lingkup Pusat dan UPT KIPM;
3. Koordinasi dengan seluruh UPT KIPM terkait pelaksanaan Investigasi yang dilakukan oleh Pusat maupun UPT KIPM;
4. Evaluasi terhadap Tindakan Karantina impor melalui sampling data *sisterkaroline* dan laporan hasil Surveilans HPIK/HPI Tertentu secara rutin oleh Tim Pusat;

5. Pembentukan Tim Pelaksana oleh Pusat maupun UPT KIPM;

a. Tim Pelaksana Pusat

Pelaksanaan kegiatan Investigasi oleh Pusat dilakukan Tim Pelaksana yang terdiri dari PHPI dengan jenjang jabatan sekurang-kurangnya PHPI Ahli Pertama.

Tim Pelaksana Pusat mempunyai tugas:

- 1) Melakukan Evaluasi data hasil pelaksanaan Tindakan Karantina melalui aplikasi *sisterkaroline* dan laporan Surveilans HPIK/HPI Tertentu;
- 2) Melakukan Verifikasi laporan, terkait penyelenggaraan perkarantinaan ikan di UPT KIPM, sebagai tindakan awal sebelum dilakukan investigasi apabila dipandang perlu;
- 3) Melakukan Evaluasi terhadap laporan atau hasil Investigasi Tim Pelaksana UPT KIPM;
- 4) Melakukan kegiatan Investigasi sesuai ruang lingkup atau temuan masing-masing;
- 5) Menyusun laporan kegiatan Investigasi sebagai bagian dari laporan berkala capaian IKU;
- 6) Menyusun laporan tahunan hasil pelaksanaan Investigasi secara kumulatif yang dilakukan oleh Pusat dan UPT KIPM sebagai salah satu dokumen capaian IKU;
- 7) Menyampaikan hasil Evaluasi dan rekomendasi perbaikan kepada Kepala Pusat Karantina Ikan; dan
- 8) Berkoordinasi terkait pelaksanaan Investigasi dan tindak lanjut rekomendasi hasil Investigasi.

b. Tim Pelaksana UPT KIPM

Pelaksanaan kegiatan Investigasi oleh UPT KIPM dilakukan oleh tim pelaksana yang terdiri dari TPHPI dan/atau PHPI yang ditetapkan/ditugaskan oleh Kepala UPT KIPM. Untuk TPHPI sekurang-kurangnya menduduki jenjang jabatan mahir, sedangkan PHPI sekurang-kurangnya Ahli Pertama.

Tim Pelaksana UPT KIPM mempunyai tugas:

- 1) Melakukan Evaluasi dan tindak lanjut temuan positif HPIK/HPI Tertentu pada kegiatan lalu lintas Media Pembawa (impor/ekspor/antar area);
- 2) Melakukan Evaluasi dan Verifikasi laporan masyarakat perikanan/pengguna jasa/stakeholder terkait kejadian penyakit atau wabah;
- 3) Segera melaporkan hasil Evaluasi tersebut ke Pusat Karantina Ikan sebelum melakukan Investigasi, agar dapat dipertimbangkan tindak lanjut yang bisa dilakukan;
- 4) Melakukan kegiatan Investigasi sebagai tindak lanjut hasil Evaluasi sesuai ruang lingkup dan kondisi atau temuan masing-masing;
- 5) Melakukan analisis penyebab dan potensi Risiko penyebaran HPIK/HPI tertentu;
- 6) Melakukan pengambilan sampel uji atau memerintahkan pengujian kepada pihak terkait sesuai hasil analisis, apabila diperlukan;
- 7) Melakukan koordinasi dengan laboratorium atau pihak-pihak terkait;
- 8) Menyusun dan melaporkan hasil Investigasi segera setelah selesai melaksanakan tugas kegiatan Investigasi sebagai upaya peningkatan pengendalian HPIK/HPI tertentu; dan

- 9) Menyampaikan laporan Investigasi secara berkala sebagai dukungan pencapaian IKU Pusat karantina Ikan.
6. Kegiatan Investigasi oleh Pusat maupun UPT KIPM dilakukan berdasarkan Juknis ini.

BAB III PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN PELAPORAN TIM PELAKSANA

Kegiatan Investigasi yang dilakukan berdasarkan adanya temuan pada pelaksanaan Tindakan Karantina atau sebagai tindak lanjut adanya laporan kejadian, perlu disusun mekanismenya agar hasil yang diperoleh dapat sesuai dengan target, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Mekanisme pelaksanaan kegiatan mencakup langkah-langkah yang perlu dilakukan mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaannya. Hal-hal yang dilakukan oleh Tim Pelaksana baik Pusat maupun UPT KIPM meliputi:

A. Persiapan

Persiapan yang harus dilakukan Tim Pelaksana sebelum melaksanakan kegiatan Investigasi antara lain:

1. Menyiapkan kelengkapan administrasi, seperti:
 - a. Dokumen perjalanan (surat penugasan, surat perintah perjalanan dinas/SPPD);
 - b. Daftar isian (*cheklist*)/kuesioner; dan
 - c. Hasil Evaluasi terhadap temuan terkait hasil pemeriksaan atau laporan oleh masyarakat perikanan/pengguna jasa/*stakeholder*.
2. Mempelajari peraturan perundangan, pedoman/juknis/SOP, dokumen dan referensi yang terkait, antara lain:
 - a. peraturan perundangan tentang Tindakan Karantina terhadap pemasukan/pengeluaran media pembawa HPIK, instalasi karantina ikan (IKI), Pedoman CKIB, dan peraturan terkait lainnya;
 - b. pedoman/petunjuk teknis; dan
 - c. referensi yang terkait.
3. Menyiapkan perlengkapan, antara lain:
 - a. Buku catatan dan alat tulis;
 - b. Alat dokumetasi; dan
 - c. Perlengkapan lain yang diperlukan.

B. Pelaksanaan

Kegiatan Investigasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mengolah data, mengevaluasi, memverifikasi dan menganalisa data sesuai kuesioner sesuai ruang lingkup dan kondisi masing-masing. Proses pengumpulan data dapat dilakukan melalui korespondensi, wawancara dengan pihak yang berkompeten/bertanggung jawab, studi dokumen serta observasi secara langsung ke lapangan apabila diperlukan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan Investigasi adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Investigasi dilakukan oleh Tim Pusat dan/atau Tim UPT KIPM berdasarkan skala prioritas, menurut tingkat Risiko penyebaran HPIK/HPI Tertentu dan potensi kerugian yang mungkin dapat ditimbulkan, serta disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Beberapa skala prioritas dalam pelaksanaan Investigasi misalnya:
 - a. Kegiatan impor Media Pembawa hidup yang memiliki nilai ekonomis penting dan potensi Risiko besar (seperti udang, ikan koi, ikan konsumsi yang dibudidayakan);
 - b. Hasil pengujian positif HPIK/HPI Tertentu pada kegiatan Surveilan di IKI;
 - c. Kejadian kasus penyakit di lokasi budidaya (*shrimp state*/kampung budidaya) pada lima jenis komoditas utama ekspor yaitu udang, kepiting, lobster, rumput laut dan tilapia; dan
 - d. Hasil pengujian positif HPIK/HPI Tertentu pada kegiatan lalu lintas (belum bersertifikat CKIB).

2. Tahapan pelaksanaan kegiatan
 - a. Pembukaan (*opening meeting*);
Tim pelaksana menyampaikan materi terkait pelaksanaan kegiatan, antara lain:
 - 1) maksud dan tujuan kegiatan Investigasi;
 - 2) teknis pelaksanaan;
 - 3) dokumen atau parameter data yang akan dibutuhkan/diverifikasi;
 - 4) petugas atau pihak-pihak yang akan diverifikasi sesuai tanggung jawab dan kewenangannya; dan
 - 5) hal lain yang relevan.
 - b. Pembahasan dan diskusi hasil temuan/kasus/laporan atau permasalahan sehingga dilakukan Investigasi, antara lain dengan:
 - 1) Penelusuran dokumen terkait;
 - 2) Penelusuran Media Pembawa terkait asal (pemasok), ketersediaan (stok) dan distribusinya. Dalam hal kegiatan melibatkan pihak lain maka dilakukan koordinasi sehingga diperoleh data-data yang valid.
 - 3) Identifikasi dan analisis sumber masalah/kasus serta potensi Risiko yang mungkin terjadi;
 - 4) penerapan biosekuriti;
 - 5) pengambilan sampel uji atau memerintahkan pengujian sesuai hasil analisis (apabila dipandang perlu); dan
 - 6) pengumpulan data melalui pengisian kuesioner Investigasi dan informasi lain yang relevan.
 - c. Menyusun resume hasil Investigasi sesuai hasil Verifikasi, penelusuran, pembahasan/diskusi.
 - d. Pertemuan penutup (*closing meeting*)
Pada kegiatan pertemuan penutup, Tim Pelaksana menyampaikan hasil sementara untuk dikomunikasikan sehingga didapatkan rumusan hasil akhir yang dapat disepakati bersama dengan lebih komprehensif.
3. Penggunaan Form/formulir
 - a. Investigasi oleh Pusat yang dilakukan dalam hal:
 - 1) tindak lanjut hasil Evaluasi berdasarkan data *siterkaroline* atau Evaluasi hasil Surveilans HPIK/HPI Tertentu, yang patut diduga terdapat ketidaksesuaian/penyimpangan, dilakukan dengan menggunakan form sebagaimana pada lampiran 1;
 - 2) tindak lanjut adanya laporan dari UPT KIPM atau pihak lain terkait adanya kasus penyakit, wabah atau kegiatan lalu lintas Media pembawa dilakukan dengan menggunakan form sebagaimana pada lampiran 1;
 - 3) tindak lanjut terkait kegiatan importasi Media Pembawa pada pengasingan selama masa karantina, untuk mengetahui kondisi kesehatan, kepatuhan dan tindakan yang dilakukan oleh importir/pemilik atau UPT KIPM, dilakukan dengan menggunakan form sebagaimana pada lampiran 3; dan
 - 4) tindak lanjut atau pendampingan terhadap kegiatan Investigasi yang dilakukan oleh UPT KIPM, dilakukan dengan mengikuti form yang dipergunakan oleh UPT KIPM.
 - b. Investigasi oleh UPT KIPM yang dilakukan dalam hal:
 - 1) adanya hasil pengujian positif HPIK/HPI Tertentu pada kegiatan lalu lintas Media Pembawa dilakukan dengan menggunakan kuesioner sebagaimana pada lampiran 1;

- 2) adanya hasil pengujian positif HPIK/HPI Tertentu pada kegiatan surveilan di IKI, dilakukan dengan menggunakan form sebagaimana pada lampiran 1;
- 3) adanya hasil pengujian positif HPIK pada kegiatan pemantauan HPIK atau keterlibatan dalam kegiatan tim satuan gugus tugas tanggap darurat Penyakit Ikan, dilakukan dengan menggunakan form sebagaimana pada lampiran 2;
- 4) adanya laporan masyarakat perikanan/pengguna jasa/stakeholder terkait adanya kejadian atau kasus penyakit atau wabah di suatu lokasi budidaya (yang tidak terkait dengan kegiatan lalu lintas), dilakukan dengan menggunakan form sebagaimana pada lampiran 2;
- 5) tindak lanjut terkait kegiatan importasi Media Pembawa pada pengasingan selama masa karantina, untuk mengetahui kondisi kesehatan, kepatuhan dan tindakan yang dilakukan oleh importir/pemilik atau UPT KIPM dilakukan dengan menggunakan form sebagaimana pada lampiran 3.
- 6) apabila pada kegiatan Investigasi, berdasarkan hasil analisis tim pelaksana dianggap perlu untuk melakukan pengambilan maka dipergunakan form pengambilan sampel sesuai lampiran 4.

C. Pelaporan Tim Pelaksana

Laporan Investigasi merupakan bagian dari capaian pelaksanaan IKU Pusat Karantina Ikan. Oleh karena itu Tim Pelaksana baik Pusat maupun UPT KIPM harus segera melaporkan hasil kegiatan, dalam rangka mendukung capaian IKU maupun peningkatan tingkat pengendalian Risiko HPIK/HPI Tertentu. Laporan Investigasi hasil pengendalian HPIK/HPI Tertentu atau tindak lanjut adanya laporan antara lain mencakup:

1. Kronologis kejadian;
2. Hasil identifikasi dan analisis sumber masalah serta penelusuran sesuai temuan/kasus/kejadian dan potensi Risiko yang mungkin terjadi;
3. Kesimpulan dan saran tindakan perbaikan untuk mengurangi Risiko pemasukan atau penyebaran HPIK/HPI Tertentu;
4. Tindak lanjut yang telah dilakukan oleh UPT KIPM; dan
5. Lampiran, berupa isian form Investigasi sesuai ruang lingkup dan kondisi temuan/kasus/kejadian masing-masing.

BAB IV EVALUASI, REKOMENDASI, DAN PELAPORAN

A. Evaluasi

Evaluasi oleh Tim Pusat dilakukan terhadap laporan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Investigasi baik Pusat maupun UPT KIPM. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui sumber permasalahan dan merumuskan tindakan perbaikan yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan Risiko pemasukan atau penyebaran HPIK/HPI Tertentu. Evaluasi yang dilakukan terhadap kegiatan Investigasi antara lain meliputi:

1. Data pelaksanaan Tindakan Karantina

Evaluasi terhadap pelaksanaan Tindakan Karantina dilakukan untuk mengetahui tingkat kesesuaian Tindakan Karantina yang dilakukan sebelum pemasukan/pengeluaran, pada saat pemasukan/pengeluaran dan setelah pemasukan, sehingga diharapkan dapat diketahui tingkat efektifitas pengendalian yang dilakukan UPT KIPM. Pengukuran tingkat kesesuaian mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, pedoman atau SOP, antara lain:

- a. Persyaratan pemasukan Media Pembawa berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. Hasil analisis Tindakan Karantina pada saat pemasukan. Hal ini terkait dengan kompetensi dan komitmen PHPI dalam menentukan target uji berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- c. Penerapan SOP dan Tindakan Karantina impor;
- d. Kemampuan UPT KIPM dalam melakukan pemeriksaan atau uji HPIK/HPI Tertentu;
- e. Ruang lingkup akreditasi laboratorium UPT KIPM;
- f. Pelaksanaan kerjasama laboratorium/subkontrak terhadap seluruh target uji HPIK/HPI Tertentu yang belum mampu dilakukan atau belum masuk ruang lingkup akreditasi; dan
- g. Pelaksanaan Surveilans HPIK/HPI Tertentu di IKI.

2. Laporan Investigasi

Evaluasi terhadap laporan Investigasi meliputi seluruh data, seperti kronologis, identifikasi dan analisis sumber masalah serta penelusuran kasus/temuan, kesimpulan dan saran. Pengukuran tingkat kesesuaian mengacu pada peraturan yang berlaku, petunjuk teknis dan referensi yang relevan. Evaluasi dilakukan terhadap ketidaksesuaian atau hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya kasus penyakit dan potensi Risiko terjadinya penyebaran HPIK/HPI Tertentu, misalnya:

- a. Kepatuhan pengguna jasa;
- b. Konsistensi penerapan biosekuriti;
- c. Asal benih/induk;
- d. Penggunaan pakan;
- e. Sistem budidaya;
- f. Hasil pengujian;
- g. Distribusi, dll.

Dengan melihat tingkat kesesuaian tersebut, akan diketahui apakah hasil Investigasi dapat dinyatakan:

- a. relevan atau tidak dengan laporan atau fakta kejadian penyakit/kasus/temuan berdasarkan kronologisnya.
- b. apakah kesimpulan dan saran serta tindak lanjut yang disampaikan mampu menjawab permasalahan atau tidak, sudah tepat atau tidak:

- 1) Dalam hal dinyatakan sudah sesuai/tepat maka dapat dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan rekomendasi oleh Tim Pusat.
 - 2) Dalam hal dinyatakan tidak sesuai/tidak tepat, maka tim Pusat dapat merumuskan rekomendasi sesuai hasil Evaluasi tersebut.
3. Pelaksanaan Investigasi
- a. Evaluasi terhadap pelaksanaan Investigasi dilakukan untuk mengetahui tingkat efektifitas dan kesesuaian pelaksanaan berdasarkan Juknis Investigasi;
 - b. Dalam hal pelaksanaan Investigasi dinyatakan menyimpang atau tidak sesuai maka akan menjadi koreksi pada pelaksanaan Investigasi yang akan datang; dan
 - c. Apabila terdapat hal-hal yang berkembang di dalam pelaksanaan Investigasi di luar juknis dan dinilai bermanfaat untuk perbaikan, maka dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk perbaikan pada Investigasi berikutnya.

Hasil Evaluasi oleh Tim Pusat dilaksanakan secara berkala setiap 3 bulan (triwulan) secara daring melalui aplikasi *zoom meeting* sesuai anggaran tahun berjalan.

B. Rekomendasi

Tim Pusat berdasarkan hasil Evaluasi tersebut apabila dipandang perlu dapat menyusun rekomendasi perbaikan sesuai dengan permasalahannya. Rekomendasi diharapkan dapat diteruskan dan ditindaklanjuti oleh setiap pemangku kepentingan untuk mengatasi permasalahan/kasus/temuan. Tindak lanjut rekomendasi dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan Tindakan Karantina dalam rangka menghilangkan atau mengurangi Risiko pemasukan/penyebaran HPIK/HPI Tertentu. Rekomendasi dapat mencakup:

1. pelaksanaan Tindakan Karantina;
2. personil atau SDM BKIPM;
3. sarana prasarana;
4. bahan kebijakan, NSPK; atau
5. pihak lain di luar BKIPM.

C. Pelaporan

Kegiatan Investigasi merupakan bagian dari laporan berkala capaian IKU Pusat Karantina Ikan yaitu Dokumen Mitigasi Risiko Lalu Lintas Media Pembawa. Oleh karena itu untuk mendukung capaian IKU tersebut, Tim Pusat maupun UPT KIPM wajib menyusun laporan kegiatan. Penyusunan laporan kegiatan sesuai dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Tim Pusat
 - 1) Laporan pelaksanaan kegiatan dilaporkan segera setelah selesai melaksanakan kegiatan, sebagaimana dijelaskan pada BAB III huruf C;
 - 2) Laporan berkala disusun setiap 3 bulan (triwulan), mencakup kompilasi hasil pelaksanaan Investigasi oleh Pusat atau UPT KIPM dan menjadi bagian dari laporan capaian IKU; dan
 - 3) Laporan tahunan yang merupakan hasil pelaksanaan Investigasi secara kumulatif yang dilakukan oleh Pusat dan UPT KIPM selama tahun 2023 dan menjadi salah satu dokumen capaian IKU.
- b. Tim UPT KIPM

Pelaporan kegiatan Investigasi oleh UPT KIPM disampaikan kepada Pusat Karantina Ikan melalui email mitigasi.Risiko@gmail.com.

- 1) Laporan kasus dilakukan segera setelah adanya temuan/kasus penyakit atau laporan masyarakat/pengguna jasa sebagaimana dijelaskan pada BAB II (bagian C.5.b.3). Pelaporan menggunakan format sesuai lampiran 5;
- 2) Laporan pelaksanaan kegiatan dilaporkan segera setelah selesai melaksanakan kegiatan, sebagaimana di jelaskan pada BAB III huruf C. Pelaporan menggunakan format sesuai lampiran 6; dan
- 3) Laporan berkala disusun setiap 3 bulan (triwulan), mencakup kompilasi hasil pelaksanaan Investigasi yang telah dilakukan oleh UPT KIPM. Pelaporan menggunakan format sesuai lampiran 7.

BAB V PENUTUP

Kegiatan Investigasi hasil pengendalian HPIK/HPI Tertentu merupakan bagian dari Monitoring dan Evaluasi Pengendalian HPIK/HPI Tertentu oleh UPT KIPM, sekaligus salah satu dukungan Capaian IKU Level 2 Pusat Karantina Ikan yaitu Dokumen Mitigasi Risiko Lalu Lintas Media Pembawa. Juknis ini akan menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Investigasi oleh Pusat maupun UPT KIPM. Melalui penerapan Juknis ini diharapkan tingkat pengendalian HPIK/HPI Tertentu oleh UPT KIPM dapat mengalami peningkatan. Selain itu, Investigasi juga merupakan salah satu upaya menghilangkan/mengurangi potensi Risiko pemasukan dan penyebaran HPIK/HPI Tertentu, sekaligus mencapai target IKU.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi merupakan bentuk dukungan terhadap visi dan kebijakan KKP dalam peningkatan produksi hasil perikanan strategis dan memiliki nilai yang sangat besar. Dengan tersusunnya Petunjuk Teknis ini diharapkan kegiatan Investigasi dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga diperoleh data yang akurat, dilakukan Evaluasi serta dirumuskan rekomendasi perbaikan kepada setiap pemangku kepentingan. Kegiatan Investigasi ini akan dapat dirasakan manfaatnya apabila hasilnya dapat diterima dan ditindaklanjuti oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu, hasil Investigasi perlu disampaikan kepada para pemangku kepentingan agar bersinergi melakukan perbaikan atau peningkatan kapasitas sesuai rekomendasi.

Dengan demikian maka BKIPM telah ikut berperan aktif dalam upaya pencegahan penyebaran HPIK/HPI Tertentu, menjaga kelangsungan budidaya dan kelestarian sumber daya alam serta peningkatan produksi perikanan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

BAB VI
LAMPIRAN

1. Form Investigasi di Instalasi Karantina Ikan.
2. Form Investigasi Kasus Penyakit di Area Budidaya.
3. Form Investigasi Importasi Media Pembawa.
4. Contoh Form Pengambilan Sampel Uji.
5. Contoh form laporan kasus/temuan/laporan hasil pengendalian penyakit.
6. Contoh format laporan hasil investigasi.

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN,

ttd.

PAMUJI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu, dan
Keamanan Hasil Perikanan,



Harri Maryadi

Lampiran 1. Form Investigasi di Instalasi Karantina Ikan

FORMULIR
INVESTIGASI KASUS POSITIF HPIK/HPI TERTENTU

A. Data UPT KIPM		
1. UPT KIPM		
2. Alamat		
3. Ka. UPT KIPM		
4. Kemampuan Lab Uji		
5. Ruang lingkup Akreditasi		
6. Sub Kontrak		
B. Data Perusahaan		
1. Nama Pemilik/Perusahaan / IKI		
2. Alamat		
3. Media Pembawa		
4. Kegiatan		
5. Status sertifikasi		CBIB/CPIB/..... *) coret yang tidak perlu
C. Data lalu lintas		
1. Jenis ikan		
2. Jumlah/populasi	 Ekor/kg
3. Negara Asal		
4. Hasil Pengujian (HPIK/HPIT)		
5. Waktu pengujian		
6. Tindaklanjut setelah dinyatakan positif HPIK/HPIT		
7. Asal MP		
8. Distribusi MP/tujuan		
9. Informasi lain yang relevan		
D. Penerapan Biosekuriti di UUPI atau instalasi		
1. Lingkungan		
2. Sarana prasarana		
3. Personil		
4. Media Pembawa		
5. SOP dan Rekaman		
6. Informasi lain yang relevan		
E. Gejala Klinis MP di IKI *) untuk Media Pembawa hidup		
1. Tingkah laku		
2. Warna kulit		
3. Daging		
4. Organ dalam (usus, limpa, ginjal, dll)		
5. Sirip ekor		
6. Hepatopancreas		*) jenis crustacea
7. Carapace		*) jenis crustacea

	8. Informasi lain yang relevan	
F.	Parameter kualitas air *) untuk Media Pembawa hidup	
	1. Sumber air/Perlakuan	
	2. Curah hujan	
	3. Suhu	
	4. pH	
	5. Kadar O2	
	6. Amoniak/ lainnya	
	7. Kekeruhan	
	8. Informasi lain yang relevan	
G.	Diagnosa sementara	
		*) berdasarkan parameter data yang diperoleh, pejabat karantina melakukan analisa terhadap: <ul style="list-style-type: none"> - kemungkinan penyebab penyakit; - potensi risiko yang mungkin terjadi; dan - menentukan tindak lanjut yang perlu dilakukan
H.	Tindak lanjut	
		Contoh: <ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan sampel (bila perlu) - Eradikasi sebagian/menyeluruh) - Penelusuran ke supplier/pemasok dll
I.	Penelusuran di supplier/pemasok	
	1. Nama Pemilik/Perusahaan	
	2. Alamat	
	3. Tingkat konsistensi penerapan biosekuriti di supplier/pemasok	
	4. Hasil pemeriksaan/surveilan yang pernah dilakukan	*) jika ada
	5. Potensi risiko penyebaran HPIK (Analisis penyebab positif HPIK)	
	6. Analisis	*) berdasarkan parameter data yang diperoleh pejabat karantina melakukan analisa terhadap: <ul style="list-style-type: none"> - kemungkinan penyebab penyakit; - potensi risiko yang mungkin terjadi; dan - menentukan tindak lanjut yang perlu dilakukan
J.	Penelusuran asal ikan (pembudidaya)	
	1. Nama Pemilik/Perusahaan	
	2. Alamat	

	3. Lokasi budidaya		
	4. Luas area budidaya (tambak/kolam)		
	5. Nama dan alamat asal benih (Hatchery)		
	6. Tingkat konsistensi penerapan biosekuriti di pembudidaya		
	7. Hasil pemeriksaan/surveilan yang pernah dilakukan		*) jika ada
	8. Potensi risiko penyebaran HPIK (Analisis penyebab positif HPIK)		
	9. Analisis		*) berdasarkan parameter data yang diperoleh pejabat karantina melakukan analisa terhadap: - kemungkinan penyebab penyakit; - potensi risiko yang mungkin terjadi; dan - menentukan tindak lanjut yang perlu dilakukan
K.	Penelusuran asal benih/induk (<i>hatchery</i>)		
	1. Nama Pemilik/Perusahaan		
	2. Alamat		
	3. Nama dan Alamat asal induk		
	4. Hasil pemeriksaan/surveilan yang pernah dilakukan		
	5. *) jika ada		
	6. Tingkat konsistensi penerapan biosekuriti di hatchery		
	7. Potensi risiko penyebaran HPIK (Analisis penyebab positif HPIK)		
	8. Analisis		*) berdasarkan parameter data yang diperoleh pejabat karantina melakukan analisa terhadap: - kemungkinan penyebab penyakit; - potensi risiko yang mungkin terjadi; dan - menentukan tindak lanjut yang perlu dilakukan
L.	Penelusuran di UPT KIPM terkait (asal ikan/benih/induk)		
	1. Nama UPT KIPM		

2. Hasil Pengujian pada saat pemasukan (masa karantina)	*) jika ada
3. Tingkat konsistensi penerapan biosekuriti di hatchery (IKI)	*) jika ada
4. Hasil pemeriksaan/surveilan yang pernah dilakukan	*) jika ada
5. Pemenuhan persyaratan pada saat pengeluaran Media Pembawa	
6. Potensi risiko penyebaran HPIK (Analisis penyebab positif HPIK)	
7. Analisis	*) berdasarkan parameter data yang diperoleh pejabat karantina melakukan analisa terhadap: - kemungkinan penyebab penyakit; - potensi risiko yang mungkin terjadi; dan - menentukan tindak lanjut yang perlu dilakukan

Kota, Tgl/bulan/tahun
Pelaksana,

1. Nama ()

2. Nama ()

Lampiran 2. Form Investigasi Kasus Penyakit di Area Budidaya

FORMULIR INVESTIGASI KASUS PENYAKIT DI AREA BUDIDAYA

Nama :
 Surat Tugas :
 Tanggal :

A.	Data UPT KIPM		
	1. UPT KIPM		
	2. Alamat		
	3. Ka. UPT KIPM		
	4. Kemampuan Lab Uji		
	5. Ruang lingkup Akreditasi		
	6. Sub Kontrak		
B	Data Kasus Penyakit		
	1. Nama Pemilik		
	2. Tempat/lokasi		
	3. Waktu Kejadian		
	4. Jenis Ikan		
	5. Umur		
	6. Populasi		
	7. Asal Ikan		
	8. Morbiditas/mortalitas		
	9. Luas Area (wabah)		
	10. Luas area Budidaya		
	11. Jenis Usaha		Pembesaran/pembenihan
	12. Status sertifikasi CPIB/CBIB		
	13. Informasi lain yang relevan		
C.	Gejala Klinis		
	1. Tingkah laku		
	2. Warna kulit		
	3. Daging		
	4. Organ dalam (usus, limpa, ginjal, dll)		
	5. Carapace dan ekor		
	6. Hepatopancreas		
	7. Informasi lain yang relevan		
D.	Kondisi lingkungan		
	1. Sumber air/Perlakuan		
	2. Curah hujan		
	3. Suhu		
	4. pH		
	5. Kadar O ₂		
	6. Amoniak/ lainnya		
	7. Kecerahan		
	8. Plankton		
	9. Metode budidaya		
E.	Penerapan biosekuriti		

	1. Lingkungan		
	2. Sarana Prasarana		
	3. Personil		
	4. Media pembawa		
	5. SOP dan Rekaman		
	6. Informasi lainnya relevan		
F.	Diagonasa klinis		
	1. Diagnosa		*) berdasarkan parameter data yang diperoleh pejabat karantina melakukan analisa terhadap: <ul style="list-style-type: none"> - kemungkinan penyebab penyakit; - potensi risiko yang mungkin terjadi; dan - menentukan tindak lanjut yang perlu dilakukan
	2. Tindak lanjut		Contoh: <ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan sampel (bila perlu) - Eradikasi sebagian/menyeluruh) - Penelusuran ke supplier/pemasok dll
G.	Penelusuran asal ikan (pembudidaya);		
	1. Nama Pemilik/Perusahaan		
	2. Alamat		
	3. Tingkat konsistensi penerapan biosekuriti di supplier/pemasok		
	4. Hasil pemeriksaan/surveilan yang pernah dilakukan		
	5. Potensi risiko penyebaran HPIK (Analisis penyebab positif HPIK)		
	6. Analisis		
H.	Penelusuran asal benih/induk (<i>hatchery</i>) *) apabila memungkinkan		
	1. Nama Pemilik		
	2. Alamat		
	3. Nama dan Alamat asal induk		
	4. Hasil pemeriksaan/surveilan yang pernah dilakukan		
	5. *) jika ada		
	6. Tingkat konsistensi penerapan biosekuriti di hatchery		
	7. Potensi risiko penyebaran HPIK (Analisis penyebab positif HPIK)		
I.	Penelusuran di UPT KIPM terkait (asal ikan/benih/induk)		

1. Nama UPT KIPM		
2. Hasil Pengujian pada saat pemasukan (masa karantina)		
3. Tingkat konsistensi penerapan biosekuriti di hatchery (IKI)		
4. Hasil pemeriksaan/surveilan yang pernah dilakukan		
5. Pemenuhan persyaratan pada saat pengeluaran Media Pembawa		
6. Potensi risiko penyebaran HPIK (Analisis penyebab positif HPIK)		
7. Nama UPT KIPM		
8. Hasil Pengujian pada saat pemasukan (masa karantina)		

Kota, Tgl/bulan/tahun
Pelaksana,

1. PHPI (.....ttd.....)

2. PHPI (.....ttd.....)

Lampiran 3. Form Investigasi Importasi Media Pembawa

FORMULIR
INVESTIGASI IMPORTASI MEDIA PEMBAWA

Nama :
Surat Tugas :
Tanggal :

A.	Data UPT KIPM		
	1. UPT KIPM	:	
	2. Alamat	:	
	3. Ka. UPT KIPM	:	
	4. Kemampuan Lab Uji	:	
	5. Ruang lingkup Akreditasi	:	
	6. Sub Kontrak	:	
B	Data Importasi		
	1. Nama Pemilik	:	
	2. Tempat/lokasi/IKI	:	
	3. Nomor PPK	:	
	4. Waktu Kejadian	:	
	5. Jenis Ikan	:	
	6. Ukuran	:	
	7. Jumlah	:	
	8. Negara asal	:	
	9. Pemenuhan persyaratan pemasukan	:	
	10. Petugas Pengawasan	:	
	11. Penempatan MP	:	*) sesuai kode, jenis dan jumlah masing-masing
	12. Pengujian/hasil Uji	:	
	13. Informasi lain yang relevan	:	
C	Pengamatan kesehatan secara klinis (hanya untuk ikan hidup)		
	1. Sehat (%)	:	
	2. Stress (%)	:	
	3. Sakit (%)	:	
	4. Mati (%)	:	
	5. Gejala klinis	:	Dijelaskan apabila terdapat ikan sakit
	6. Informasi lain yang relevan	:	
D.	Kondisi lingkungan (hanya untuk ikan hidup)		
	1. Sumber air	:	*)dijelaskan perlakuan yang dilakukan
	2. Curah hujan	:	
	3. Suhu	:	
	4. pH	:	

	5. Kadar O2	:	
	6. Amoniak/ lainnya	:	
	7. Kekeruhan	:	
	8. Plankton	:	
	9. Metode budidaya	:	
	10. Informasi lain yang relevan	:	
E.	Penerapan biosekuriti		
	1. Lingkungan	:	
	2. Sarana Prasarana	:	
	3. Personil	:	
	4. Media pembawa	:	
	5. SOP dan Rekaman	:	
	6. Informasi lainnya relevan	:	
F.	Pengambilan sampel uji (berdasarkan diagnosa/hasil pengamatan)		
	1. Jenis Media Pembawa	:	
	2. Ukuran	:	
	3. Target HPIK	:	
	4. Alasan pengambilan sampel uji	:	
G.	Kepatuhan selama masa karantina (kelengkapan dan keaslian Media Membawa)		
	1. Jumlah dan Jenis Media pembawa	:	
	2. Pemindahan	:	
	3. Distribusi	:	
	4. Informasi lain yang relevan	:	
H.	Analisis		
	1. Diagnosa	:	*) berdasarkan parameter data yang diperoleh pejabat karantina melakukan analisa terhadap: - kemungkinan penyebab penyakit; - potensi risiko yang mungkin terjadi; - kepatuhan pemilik/importir dan - menentukan tindak lanjut yang perlu dilakukan
	2. Tindak lanjut	:	Contoh: - Pengambilan sampel (bila perlu) - Eradikasi sebagian/menyeluruh) - dll

Kota, Tgl/bulan/tahun
Pelaksana,
1. PHPI (.....ttd.....)
2. PHPI (.....ttd.....)

Lampiran 4. Contoh Form Pengambilan Sampel Uji

PENGAMBILAN SAMPEL UJI
INVESTIGASI KASUS PENYAKIT

Nama Pemilik :
Alamat :
Tanggal :

No.	Jenis sample	Ukuran/ Umur	Jumlah sample	Populasi	Target Uji	Keterangan
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

Catatan:

- Pengambilan sampel uji dilakukan berdasarkan analisa terhadap kemungkinan penyebab terjadinya kasus penyakit/wabah
- Sampel uji dapat berupa ikan, pakan, air, lumpur dll yang diduga menjadi penyebab terjadinya kasus penyakit/wabah

Kota, Tgl/bulan/tahun
Pelaksana,

1. PHPI (.....ttd.....)
2. PHPI (.....ttd.....)

Lampiran 5. Contoh form laporan kasus/temuan/laporan hasil pengendalian penyakit

Kepada Yth.
Kepala Pusat Karantina Ikan

Dalam rangka pelaksanaan mitigasi risiko kami sampaikan bahwa berdasarkan adanya hasil pemeriksaan/importasi/laporan*) sebagaimana data-data sebagai berikut:

1.	Nomor LHU/PPK/Laporan*)	:	
2.	Tanggal	:	
3.	Nama	:	
4.	Alamat	:	
	Dinyatakan bahwa	:	- Hasil Surveilans HPIK/HPIT dinyatakan positif WSSV pada sampel udang hias (<i>Caridina sp</i>) **)
			- Hasil pengujian sampel No. DK. 123 sesuai PPK NO. 12345 dinyatakan positif KHV **)
			- Telah terjadi kasus penyakit di tambak sdr..... yang berlokasi di..... **)
			- Dst.

Keterangan:

*) pilih salah Satu

**) contoh pengisian disesuaikan dengan kondisi masing-masing

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon arahan untuk tindak lanjutnya. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahnya disampaikan terima kasih.

Kota, tgl/bulan/tahun
Kepala.
ttd
(Nama)

Lampiran 6. Contoh format laporan hasil investigasi

- I. Pendahuluan
 - A. Kronologis (latar belakang)
 - B. Tujuan investigasi
- II. Pelaksanaan Investigasi
 - A. Waktu dan Tempat
 - B. Metode pelaksanaan
 1. Pengumpulan Data
 2. Pengambilan Contoh Uji (bila diperlukan)
 3. Hasil pengujian (bila dilakukan)
- III. Hasil Investigasi
 - A. Analisis dan Evaluasi (sesuai data kuesioner dan hasil pengujian)
 1. Ketelusuran penyakit
 2. Penyebab penyakit
 3. Prediksi potensi risiko yang mungkin terjadi
 - B. Kesimpulan dan Saran
- IV. Lampiran berupa kuesioner investigasi

Keterangan:

- Substansi laporan disesuaikan dengan kondisi masing-masing;
- Kondisi pada ikan hidup berbeda dengan ikan mati;
- Kondisi di IKI berbeda dengan dengan di tambak/kolam;
- Investigasi pada kegiatan importasi berbeda dengan investigasi pada kegiatan surveilan
- dsb.

Lampiran 7. Contoh form laporan triwulan kegiatan investigasi di UPT KIPM

LAPORAN INVESTIGASI/KASUS PENYAKIT
UPT KIPM
TRIWULAN I/II/III

No.	Waktu Kejadian (Tgl/bln/tahun)	Uraian Kasus/temuan/laporan	Tindak lanjut (investigasi)	Hasil Investigasi	Kesimpulan	Keterangan
1.						
2.						
3.						

Keterangan: dalam hal terjadi banyak kasus dan tidak dapat dilakukan investigasi, maka seluruh kasusnya tetap dilaporkan sesuai jumlah kasus/temuan/laporan

Kota, tanggal/ bulan/tahun
Ka. UPT KIPM
(.....)